

Implementasi Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)

[Implementation Of Food Security (Case Study Of Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency)]

Dwi Ariyanti ¹⁾, Hendra Sukmana ^{*,2)}

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This research study aims to find out how the development of food security in Tropodo village, Krian district, Sidoarjo regency. And knowing the problems of food security in Tropodo village, Krian district, Sidoarjo regency to improve community welfare in order to help the economic recovery that had previously declined due to the Covid 19 outbreak. In addition, actions have been and still need to be done to realize food security and improve farmers in the future. The approach used in This research uses a qualitative descriptive methodology, and via interviewing, documentation and observation. The results of the research how that : (1) the government's measures and objectives in the food security program in Tropodo village aim to help minors who are currently stunted. (2) resources in the food security program in Tropodo village currently some of the brsar still have constraints in human resources where the village government will not socialize the food security program so therefore the community does not know the program. For financial resources and infrastructure resources, there are currently no serious obstacles. (3) inter-organization communication in the implementation of food security, the village government has currently communicated whit POKMAS for food security development, but in communication between residents, the village government has not done so. (4) political, social, and economic context throughout implementation of food security programs in Tropodo village, Krian district, where the environment is very helpful for the community to find work. And the program also received support from the Sidoarjo regency government in the food security program.*

Keywords – *implementation, food security, economi*

Abstrak. *Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan ketahanan pangan yang berada di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan tentang ketahanan pangan di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat membantu pemulihan perekonomian yang dulunya sempat menurun karena adanya wabah Covid-19. Serta langkah-langkah yang dilakukan guna mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan pendapatan petani dimasa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa: (1) Ukuran dan Tujuan pemerintah dalam program ketahanan pangan di Desa Tropodo bertujuan untuk membantu anak di bawah umur yang saat ini mengalami stunting. (2) Sumber Daya dalam program ketahanan pangan di Desa Tropodo saat ini sebagian brsar masi terdapat kendala dalam sumber daya manusianya dimana pemerintah desa kurang akan mensosialisasikan program ketahanan pangan maka sebab itu masyarakat belum mengetahui program tersebut. untuk sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana saat ini tidak ada kendala yang serius. (3) Komunikasi Antar Organisasi dalam implementasi ketahanan pangan pemerintah desa saat inimsudah melakukan komunikasi dengan POKMAS untuk pengembangan ketahanan pangan tetapi dalam komunikasi antar warga pemerintah desa belum melakukannya. (4) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Tropodo Kecamatan Krian dimana lingkungan tersebut sangat membantu para masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Dan program tersebut juga dapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam program ketahanan pangan.*

Kata Kunci – *Implementasi, food security, ekonomi*

I. PENDAHULUAN

Kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, air, dan air untuk mencukupi pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan ketahanan pangan di desa. Kebijakan ketahanan pangan desa mengacu pada upaya pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, khususnya dalam penyelenggaraan desa bebas kemiskinan, kelaparan, desa sehat dan sejahtera, serta desa yang memenuhi kebutuhan dasar. Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Tujuan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan infrastruktur dan fasilitas desa, dan menstimulasi perekonomian lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemampuan untuk mengentaskan kemiskinan. ekspansi, dan secara bijaksana memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia. Hal ini semakin didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang mengatur bahwa paling sedikit 20% (dua puluh persen) Dana Desa harus dialokasikan untuk inisiatif ketahanan pangan dan peternakan.[1]

Kemampuan suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan sangatlah penting; Seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa negara lain, tidak ada negara yang dapat mencapai pertumbuhan yang stabil sebelum mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga diperlukan di negara mana pun untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015, ketahanan pangan dan gizi adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi suatu bangsa dan setiap orang. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, bervariasi, memenuhi kebutuhan gizi, terdistribusi secara merata, harga terjangkau, dan memenuhi kriteria lainnya. mencapai status gizi ideal tanpa bertentangan dengan standar masyarakat, agama, atau moral dan menjalani kehidupan yang berkelanjutan, aktif, dan bermanfaat.[2]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam penyediaan, pendistribusian, dan konsumsi pangan secara berkala dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada dan sedang dikembangkan di tingkat pedesaan produksi pangan mengelola dan mengembangkan lahan produktif. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan pertumbuhan penduduk yang pesat, inisiatif pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan harus diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nasional. Karena ketersediaan, stabilitas, dan pola konsumsi perlu diatur oleh suatu institusi. Salah satu negara yang sangat memperhatikan pangan warganya adalah Indonesia, dimana Badan Pangan Nasional didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi (DKP) se-Indonesia diundang pada Dewan Ketahanan Pangan 2020 Rapat Gubernur selaku ketua, mengungkapkan pentingnya kesadaran ketahanan pangan sebagai salah satu landasan ketahanan nasional dan daerah. Merancang strategi ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021[3]. Persiapan kerja sudah mulai berjalan dengan kelompok kerja teknis dan lintas sektor (pokja) Dewan Ketahanan Pangan.

Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah akan terus meningkatkan produksinya sehingga menjamin kecukupan pangan. Ketahanan sosial, keamanan nasional, stabilitas politik, dan stabilitas ekonomi semuanya berkorelasi kuat dengan ketahanan pangan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena berkaitan dengan keterjangkauan pangan. Mengingat sulitnya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tanpa dukungan pangan yang cukup dan berkualitas, pemerintah berdedikasi untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prasyarat bagi seluruh aspek pembangunan nasional. Dengan adanya program ketahanan pangan tersebut pemerintah berharap agar membantu masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, dan dapat hidup sehat dengan gizi yang baik. Penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, gizi seimbang, dan aman memenuhi kebutuhan pangan dan gizi (B2SA)[4]

Ketahanan pangan Indonesia akan kembali meningkat pada tahun 2022 setelah mengalami penurunan selama dua tahun sebelumnya akibat pandemi. Menurut *Global Food Security Index* (GFSI), indeks ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai level 60,2 yang artinya lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2020-2021. Namun, Saat ini, tingkat ketahanan pangan Indonesia sangat rendah; angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang memiliki indeks 62,2 dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang memiliki indeks 63,4. Namun, dibandingkan dengan negara lain, GFSI mengamati bahwa harga pangan di Indonesia secara umum cukup masuk akal. Hal ini terlihat dari skor keterjangkauan Indonesia yang sebesar 81,4, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik (73,4). Indonesia sejauh ini sudah berhasil membangun infrastruktur pertanian, sehingga kemungkinan besar penyediaan pangan bisa teratasi dengan baik. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kebutuhan nutrisi dan variasi makanan untuk meningkatkan kualitas pangan. [5]

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dan hampir semua kecamatan memiliki peran masing-masing dalam program pengelolah ketahanan pangan nabati dan pangan non nabati. Pemkab kabupaten Sidoarjo terus mendorong di setiap desa supaya mempunyai inovasi di bidang ketahanan pangan. Apalagi saat ini pemerintah pusat menentukan minimal 20 persen dari dana desa yang harus dipakainya program ketahanan pangan. Bupati Sidoarjo yang kerap dipanggil dengan sebutan Gus Muhdlor mengatakan bahwa untuk lahan kosong yang tidak terpakai bisa di gunakan untuk lahan pertanian. PPK Sidoarjo juga melakukan pelatihan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, Dengan memanfaatkan lahan kosong, proyek ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai ketahanan pangan [6] Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan juga menjadi tujuan lainnya. Salah satu tujuannya juga untuk meningkatkan

kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Perang UMKM juga sangat penting dimana para pekerja UMKM bisa berkontribusi untuk menjalankan program ketahanan pangan yang khususnya di Sidoarjo. Dengan adanya program ketahanan pangan pemerintah kabupaten Sidoarjo berharap bisa dapat memulihkan perekonomian yang sempat menurun akibat adanya wabah covid 19 dan masyarakat bisa lebih aktif untuk menjalankan program-program yang sudah dibuat,serta dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan gizi yang cukup serta dapat hidup sehat.[7]

Implementasi ketahanan pangan di Desa tropodo sudah berjalan sejak tahun 2022 sesuai dengan intruksi dari Kemendes. Pemerintah pusat membuat program ketahanan pangan bertujuan untuk pemulihan ekonomi setelah adanya wabah Covid 19 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun, dan Desa Tropodo juga merasakan dampak dari adanya wabah Covid 19. Banyak para pekerja yang diberhentikan secara paksa. Dan pemerintah menginisiasi ketahanan pangan di setiap Desa, salah satunya di Desa Tropodo, yang saat ini telah menjalankan program ketahanan pangan di bidang perkebunan dan budi daya ikan, Program tersebut banyak masyarakat yang ikut serta membantu adanya program ketahanan pangan khususnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan setelah adanya wabah Covid 19. Program ketahanan pangan ini berfokus di budidaya ikan sedangkan untuk perkebunan juga masih di jalankan dan sudah beberapa kali panen. program ketahanan pangan dalam budidaya ikan sudah terdapat kolam ikan yang di gunakan sebagai budidaya ikan, budidaya tersebut di kelola oleh POKMAS (kelompok masyarakat). Dari budidaya ini sudah mengalami masa panen. Hasil panen tersebut akan dibagikan kepada warga secara gratis karena program ini masih pemula. Dan bagi masyarakat yang mempunyai anak yang gizinya kurang akan di bantu oleh pemerintah Desa supaya bisa memenuhi gizi yang bagus dan sehat dengan memberikan makanan yang sehat dari hasil ketahanan pangan yang sekarang sudah di jalankan. Program ketahanan pangan ini khususnya di budidaya ikan kedepannya akan di jadikan kolam pancing ikan, untuk masyarakat bisa memancing disitu. Dibawah ini adalah data rekapitulasi data ketahanan pangan di Desa Tropodo Kecamatan Krian.

Pemerintah Desa Tropodo juga memikirkan bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakatnya oleh karena itu di bentuklah program ketahanan pangan tersebut sehingga dapat membantu para masyarakat dan para anak-anak yang terkena stunting. Konsep kesejahteraan sudah berkembang sangat luas, kesejahteraan bukan hanya soal nominal saja yang di dapatkan, tetapi dengan membangun sebuah program yang bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu juga bisa di katakan sebagai kesejahteraan. Kesejahteraan sendiri mempunyai arti *standart living wellbeing, welfare, and quality of life*. Kesejahteraan kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk menentukan kualitas anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup. Dalam mengukur kesejahteraan dilihat dari sisi pengeluaran untuk keperluan pangan suatu masyarakat atau keluarga. [8]

Tabel 1.
Rekapitulasi program ketahanan pangan di Desa Tropodo Kecamatan Krian

No.	Nama Program	Tahun	Anggaran	Anggaran Terpakai	Terealisasi
1	Bidang pengembangan industri perkebunan pertanian, peternakan (kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa)	2022	Rp. 301.415.410	Rp. 300.851.000	55,00%
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Kegiatan penguatan pangan tingkat desa)	2023	Rp. 239.234.000	Rp. 125.000.000	52,25%

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Tropodo Kecamatan Krian (2023.)

Berdasarkan tabel 1. Terlihat dari data diatas bahwa program ketahanan pangan di desa tropodo belum terealisasikan dengan secara maksimal dikarenakan banyaknya permasalahan yang ada di ketahanan pangan seperti sarana prasarana yang kurang memadai. Dengan anggaran tersebut Desa Tropodo akan memanfaatkan sebaik mungkin supaya program ketahanan pangan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Meski proporsional,

pengembangan potensi pertanian termasuk komoditas perikanan sangat penting untuk memasuki era globalisasi. Pemerintah juga diperkirakan akan memberi bobot yang sama pada pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan pertanian.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Duwie Putra dkk (2022) yang berjudul “Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan di kota Palembang” penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemberdayaan masyarakat berpengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan; dan (2) Ketahanan pangan Kota Palembang mengalami peningkatan sebesar 90,3% sebagai dampak dari eksekusi kebijakan, hal ini terlihat dari tingginya nilai validitas pernyataan ketigabelas yang mewakili aspek pemerintahan. Ketahanan pangan Kota Palembang memiliki peringkat validitas paling besar jika dilihat dari proporsi desa yang tidak mempunyai akses sambungan listrik yang memadai, dan (3) Dengan nilai validitas paling besar pada indikator usaha/industri rumah tangga, implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat secara gabungan memberikan pengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang. (Hendra Duwie Putra, Andries Linardo, Azwar Agus 2022). [9]

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk (2023) yang berjudul “ Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir”. Perspektif dan sikap para aktor pemangku kepentingan menjadi fokus utama metodologi penelitian deskriptif kualitatif ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan isu rumit yang melibatkan banyak pihak, wilayah geografis yang beragam, dan dinamika dinamis yang berubah seiring berjalannya waktu; oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan. Pemerintah membentuk dewan ketahanan pangan melalui Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2021 yang mengatur tentang koordinasi, pengkajian, dan pengelolaan kegiatan untuk mencapai ketahanan pangan nasional, dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinergitas tersebut. Saat ini telah terbentuk tiga puluh dua dewan ketahanan pangan kabupaten/kota. Karena berpegang pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, Dengan demikian, program percepatan diversifikasi konsumsi pangan (P2KP) dan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai bagian dari rencana aksi ketahanan pangan Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan dengan sangat baik (Yulianti, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, KMS. Novyar Satriawan Fikri 2023). [10]

Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Riyan Saputra (2022) yang berjudul "Implementasi Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan". Penelitian ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan di masyarakat dan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan teori Siagian yang mengidentifikasi lima faktor—sasaran, jangka waktu, pengeluaran, jenis kegiatan, dan tenaga kerja—yang diperlukan untuk mengkaji bagaimana program bantuan Desa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pendekatan teoritis Siagian berkonsentrasi pada kelompok sasaran di samping pelaksanaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana ketahanan pangan telah menjadi isu bagi pertumbuhan pertanian. Dengan mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan strategis, maka penting untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan guna meningkatkan sistem ketahanan pangan untuk keperluan dalam negeri. Upaya yang dilakukan pemerintah. (Riyan Saputra 2022). [11]

Dari observasi dilapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi ketahanan pangan di Desa Tropodo Kecamatan Krian, diantaranya yang pertama adalah pada manajemen keuangan dimana masyarakat belum biasa mengelola keuangan dengan baik, sehingga masih membutuhkan bantuan dari perangkat desa. Dikarenakan belum ada pelatihan bagaimana cara untuk mengelola manajemen keuangan yang baik. Yang kedua sarana prasarana yang kurang memadai khususnya untuk pengembangan penyaluran hasil ketahanan pangan. Ketiga banyaknya ikan yang terjangkit penyakit karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurangnya ketanggapan POKMAS dalam mengelola budidaya ikan. Keempat belum menjalankan sistem teknologi yang dimana sistem teknologi ini sangat di perlukan dalam program ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ada dalam ketahanan pangan. Dan untuk hasil dari ketahanan pangan tersebut sebagian masyarakat belum menerima manfaat dari hasil panen yang pertama. Sebagian juga tidak mengetahui adanya program tersebut.

Dari observasi dilapangan peneliti memilih teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the policy implementation (1975). Menurut model ini, pilihan politik, implementasi kebijakan, dan kinerja kebijakan publik semuanya mengikuti jalur linier. Model ini menjelaskan bagaimana sejumlah variabel yang saling terkait mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan berjalan. Variabel-variabel tersebut antara lain pertama, ukuran dan tujuan organisasi; kedua, sumber dayanya; ketiga, karakteristiknya sebagai pelaksana; keempat, sikap atau disposisi para pelaksana; kelima, komunikasi antara organisasi dan aktivitasnya; dan keenam, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

Pertama Tingkat pencapaian pengukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dapat digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, menurut model variabel Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn (Sulaiman 1998), evaluasi efektivitas implementasi kebijakan mengungkapkan sejumlah persyaratan dan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan. Intinya, kinerja kebijakan adalah

evaluasi terhadap kriteria dan tujuan yang telah dicapai. Kedua, sumber daya baik manusia maupun bukan sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses implementasi kebijakan. Kompetensi pelaksana untuk menangani sumber daya yang tersedia menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Ketiga, Karakteristik Organisasi Pelaksana, berkaitan dengan lingkungan kebijakan yang akan diterapkan pada banyak kebijakan dan memerlukan pelaksana kebijakan yang teliti dan tertib, hal ini sangat penting bagi sebuah kebijakan agar kebijakan yang dijalankan bias berjalan sesuai SOP nya. Keempat ada tiga aspek krusial yang tercakup dalam disposisi atau sikap pelaksana yaitu reaksi, kognisi, dan intensitas disposisi. Kelima, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dimungkinkan bila terdapat penetapan tujuan yang jelas dalam komunikasi antarorganisasi. Karena efektivitas pelaksanaan kebijakan bergantung pada ketersediaan informasi yang jelas, komunikasi sangat penting dalam implementasinya. Keenam, Faktor yang berasal dari pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam menentukan arah atau proses pelaksanaan kebijakan tergolong faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. dengan demikian Anda dapat memastikan sejauh mana mereka mendukung kebijakan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini berfokus pada proses pengimplementasian ketahanan pangan yang ada di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. (1998:24) Penelitian yang menghasilkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan metode pengukuran atau statistik disebut penelitian kualitatif. Penggunaan teknik kualitatif dibenarkan oleh fakta bahwa penelitian dapat memberikan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang diucapkan, gambar visual, atau perilaku yang diamati. Memahami data yang dihasilkan melalui survei lapangan merupakan tujuan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:274) data dapat dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data primer dan sekunder merupakan sumber data. Data primer berasal langsung dari sumber yang dicatat dan diamati, seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung. Jurnal dan media merupakan sumber data sekunder yang baik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif supaya peneliti dapat menilai dan mengkarakterisasi peristiwa yang telah mereka lihat selama penelitian dan membuat kesimpulan terkait penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang digunakan sebagai sumber informasi data berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dalam penelitian ini sebagai informannya adalah Kepala Desa, Kasun, POKMAS, dan Masyarakat. peneliti menggunakan metode analisis oleh interaktif dari Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi, pertama Pengumpulan Data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data, reduksi data merupakan proses yang berupa selektif berfokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis untuk menggabungkan informasi penting dan membuang informasi yang tidak perlu. Ketiga, Penyajian Data: Pengumpulan data lapangan ke dalam format yang lebih terstandarisasi dan mudah diakses disebut penyajian data. Dengan cara ini, memperoleh gambaran luas dan melakukan evaluasi secara keseluruhan menjadi lebih sederhana. Keempat, Membuat Kesimpulan: Mengumpulkan semua data dan mendasarkannya pada informasi yang dihasilkan oleh peneliti lapangan adalah proses membuat kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tropodo merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Desa yang memiliki potensi pengembangan ketahanan pangan. Untuk mengetahui gambaran dari implementasi ketahanan pangan oleh sebab itu pemerintah membuat program ketahanan pangan, salah satunya di Desa Tropodo yang membuat program budidaya ikan. Maka peneliti menganalisa keberhasilan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn dimana ada 6 (enam) indikator akan dapat mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan pada Program Ketahanan Pangan. Keenam indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran Dan Tujuan

Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan dapat dievaluasi dengan melihat seberapa baik kebijakan tersebut memperkuat langkah-langkah dan kebijakan yang sesuai untuk budaya sosial secara luas. Mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan akan menjadi tantangan jika terlalu ideal. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan secara organik, menetapkan tolok ukur, dan mencapai tujuan para pelaksana politik khususnya tindakan politik adalah cara untuk mengukur sejauh mana tolok ukur dan tujuan terpenuhi.

Tujuan utama pengelolaan pangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 4 adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menciptakan pangan bagi dirinya sendiri. Kedua, menawarkan beragam pilihan makanan untuk memenuhi permintaan pelanggan akan nutrisi, keamanan, dan kualitas. Ketiga, memastikan tersedianya pangan yang cukup, khususnya pangan pokok, dengan biaya terjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, menjadikan pangan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki akses yang cukup terhadap pangan. Kelima, menjadikan produk pangan lebih kompetitif baik di pasar dalam negeri maupun internasional serta mempunyai nilai tambah. Keenam, meningkatkan pendidikan konsumen dan pemahaman tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam industri pangan, termasuk petani, nelayan, dan pelaku budidaya perikanan, menempati urutan ketujuh. Kedelapan, melestarikan dan memperluas persediaan pangan negara yang sangat besar. (UU No. 18 Tahun 2012).[2]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa desa Tropodo dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dapat dikatakan berhasil baik dari skala maupun tujuan kebijakan. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Haris Iswandi, Kepala Desa Tropodo, beliau mengatakan:

“Disini banyak anak memiliki gizinya yang kurang maka dengan program ketahanan pangan ini berharap bisa membantu anak-anak yang kekurangan gizi supaya bisa mendapatkan gizi yang sehat dan layak dari hasil ketahanan pangan tersebut” (wawancara tanggal 19 juni 2023)

Terkait dari hasil wawancara Penerapan gizi yang baik diharapkan dapat menjadikan balita menjadi pribadi yang baik kedepannya jika gizi yang di berikan terpenuhi, dengan seiring berjalannya waktu atau perkembangan balita, ada sebanyak 71,9 % ibu dengan pola asuh yang buruk dan Pendidikan yang kurang dan mengakibatkan anak di bawah usia 5 tahun terkena gizi buruk[12]. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah membuat program ketahanan pangan agar balita yang memiliki gizi yang kurang agar dapat tercukupi dengan adanya program tersebut. Demikian juga dengan ketahanan pangan merupakan kondisi bagi semua keluarga untuk memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Jika ketahanan pangan kurang maka status gizi juga kurang. Maka dengan diadakannya program ketahanan pangan di Desa Tropodo Kecamatan Krian bertujuan untuk memenuhi gizi para balita. Dari hasil budidaya ikan dan hasil dari perkebunan nantinya sebagian besar akan di berikan kepada anak-anak yang memiliki gizi yang kurang. Supaya dapat terpenuhi dengan baik, dengan memberikan gizi yang baik dan sehat maka akan membantu anak bias tumbuh berkembang dengan baik dan nantinya bias menjadi pribadi yang baik.

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dikaitkan dengan teori jenis ukuran dan tujuan telah sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1974) bahwa Pemerintah Desa Tropodo dalam mengimplementasikan kebijakan program ketahanan pangan sudah bisa dikatakan berhasil dimana pemerintah desa sudah menerapkan program ketahanan pangan sesuai tujuan dan ukuran yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat maka dari itu pemerintah desa berharap dengan adanya program tersebut dapat membantu anak-anak di bawah umur yang mengalami stunting. Pemerintah desa juga sudah mengupayakan program ketahanan pangan supaya bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan perekonomian. Dengan adanya program ini pemerintah desa juga bantuan oleh kelompok masyarakat (POKMAS) untuk bekerjasama dalam program ketahanan pangan sehingga program tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk menerapkan kebijakan, ada tiga sumber daya yang harus diidentifikasi: waktu, uang, dan manusia. Sumber daya paling penting yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan adalah manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang kualitas kerjanya sesuai dengan garis politik yang diputuskan, maka sumber daya manusia sangat menentukan pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika pendanaan terhambat atau bermasalah, kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal. Donald Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 2008) berpendapat bahwa “alat politik, termasuk pers. Ketersediaan sumber daya kebijakan tersebut diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini berupa bantuan keuangan atau insentif lain yang dapat mempercepat penerapan kebijakan. Oleh karena itu, terbatasnya pendanaan akan membuat implementasi kebijakan menjadi kurang efektif. [13]

Dari segi sumber daya manusia atau personel dalam proses pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan, seluruh lapisan masyarakat desa Tropodo harus ikut serta dalam mendorong atau mengembangkan program ketahanan pangan yang baru dilaksanakan selama ini. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sumber

daya manusia program ketahanan pangan di desa Tropodo masih menghadapi kesulitan dan kekurangan. Hal ini bisadibuktikan dengani hasil wawancara dengan Bapak Risky selaku petugas perencanaan.

“Untuk saat ini yang terlibat dalam pengembangan Program Ketahanan Pangan adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat adanya wabah Covid 19. Orang-orang dengan semangat dan loyalitas yang besar terhadap pembangunan Program Ketahanan Pangan. Dan tak lain juga di bantu dengan perangkat desa yang paham akan ketahanan pangan, bahkan kepala desanya pun ikut terjun langsung untuk mengembangkan ketahanan pangan” (wawancara tanggal 19 juni 2023).

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah desa Tropodo kesulitan dalam merekrut pegawai. Dimana banyak masyarakat yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan kemajuan desanya. Dan sebagian masyarakat juga belum tau adanya Program Ketahanan Pangan tersebut, maka dengan itu pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi mengenai Program Ketahanan Pangan supaya mudah untuk kedepannya dalam mengembangkan program tersebut. Dalam proses pengembangan Program Ketahanan Pangan sebagian masyarakat ikut serta dalam mendukung pemerintah desa dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu pemerintah Desa Tropodo sangat terbuka bagi siapa saja yang ikut serta membantu proses pengembangan program ketahanan pangan ini dan tidak ada kriteria khusus asalkan tekun dan rajin bekerja dan tidak terpaksa serta mempunyai tanggungjawab tinggi untuk mengembangkan program ketahanan pangan.

Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan memerlukan Sumber Daya Manusia yang serius, tekun dan aspiratif. Namun, melihat kenyataan yang ada saat ini, peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat kini lebih mementingkan keinginan pribadinya dibandingkan kemajuan desanya. Jadi untuk saat ini yang terlibat dalam program ketahanan pangan saat ini hanyalah orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk bekerja, dalam komunitas ini dikelompokkan ke dalam POKMAS. Dalam program tersebut juga pemerintah juga harus menyiapkan kelompok tani, mengapa karena dengan dengan kelompok tani tersebut dapat meningkatkan hasil panen budidaya ikan tersebut, pemerintah juga harus membuat pelatihan untuk para petani agar dapat meningkatkan kemampuan petani untuk dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan program ketahanan pangan yang ada di Desa Tropodo Kecamatan Krian. [8]

Kedua, Sumber Daya Finansial. Sumber daya finansial ini sangat diperlukan dalam program ketahanan pangan, dimana sumber daya finansial ini akan membantu berjalannya program tersebut. Anggaran yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan program ketahanan pangan ini sudah tersedia anggaran khusus yang di turunkan oleh pemerintah pusat sebesar 20% dari anggaran APBD. Dengan anggaran tersebut Pemerintah Desa Tropodo menggunakan dengan sebaik mungkin dan bisa dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 2.
Anggaran Program Ketahanan Pangan di Desa Tropodo

Tahun	Anggaran
2022	Rp. 301.415.410
2023	Rp. 239.234.000

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Tropodo Kecamatan Krian (2023)

Dari tabel diatas, dana tersebut akan di gunakan dengan sebaik mungkin karena tidak mudah untuk mengelolah anggaran yang begitu banyaknya maka untuk itu pemerintah desa memperhatikan betul agar program yang baru saja di jalankan bisa dikembangkan secara maksimal. Dari Sumber Daya Finansial ini sangat membantu pemerintah desa untuk memulihkan perekonomian yang sempat turun karena adanya wabah Covid 19 dengan melalui Program ketahanan Pangan.

“Anggaran untuk program ketahanan pangan saat ini dapat dari anggaran APBD yang 20% nya untuk program ketahanan pangan. Dengan anggaran sebanyak ini kami akan semaksimal mungkin supaya program tersebut dapat berkembang lebih baik” (Wawancara tanggal 19 juni 2023)

Dapat diartikan pada aspek Sumber Daya Finansial dalam pengembangan program Ketahanan Pangan yang ada di Desa Tropodo sejauh ini tidak ada masalah yang serius dari segi keuangannya.

Yang ketiga merupakan Sumber Daya Sarana atau Prasarana, ketersediaan sarana dalam suatu program sangat dibutuhkan. Sarana merupakan komponen atau tambahan yang bekerja di belakang layar untuk menunjang koordinasi kegiatan dan fungsi kerja. Sedangkan prasarana mengacu pada elemen yang digunakan untuk menjalankan operasi yang sedang berlangsung. Tanpa adanya sarana tidak mungkin tercapainya tujuan tersebut secara optimal. Prasarana adalah perangkat yang digunakan sebagai alat bantu utama untuk

mencapai suatu tujuan, sedangkan fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. [14]. Mengenai fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan Program Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Desa Tropodo sudah cukup memadai dimana di sana sudah terdapat gazebo, kolam pancing, toilet, kolam pembibitan, area perkebunan, mushola. Sebagai bahan pendukung hasil observasi ini bisa dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 3.

Sarana dan Prasarana Program Ketahanan Pangan	
Sarana dan Prasarana	Jumlah
Kolam Ikan	2 unit
Kolam Pembibitan	1 unit
Toilet	1 unit
Area Perkebunan	2 unit

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Tropodo Kecamatan Krian (2023)

Tabel 3 menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang berada dilokasi program ketahanan pangan di Desa Tropodo sebagai fasilitas juga sangat memadai bagi para pengunjung nantinya. Fasilitas yang memadai akan membuat para pengunjung nyaman berada disana. Meskipun masih banyak yang terhambat dalam pembangunan sarana dan prasarananya contohnya seperti tempat parkir yang masih proses untuk pemasangan paving. Sejauh ini tidak ada permasalahan yang serius mengenai sarana dan prasarana semua sudah teratasi dengan semaksimal mungkin.

Untuk sumber daya yang ada di Desa Tropodo jika di kaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1974) terdapat beberapa permasalahan di lapangan, seperti dalam sumber daya manusia, kurang nya sosialisasi dalam program ketahanan pangan yang ada di desa tropodo, juga sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut. Sedangkan untuk sumber daya finansial dan sarana prasarana sudah sesuai dengan pendapat yang di katakana oleh Van Meter dan Van Horn (1974) dimana sumberdaya finansial dan sumber daya sarana prasarana sangat penting untuk program ketahanan pangan dimana dengan kedua sumber daya tersebut akan membantu pemerintah untuk membangun pengembangan ketahanan pangan yang ada di Desa Tropodo. Jadi untuk kesimpulannya dalam sumber daya ketahanan pangan menurut teori Van Meter dan Van Horn (1974) sebagian besarnya masih belum sesuai dengan yang di katakana oleh Van Meter dan Van Horn (1974).

3. Komunikasi Antar Organisasi

Badan pelaksana harus sepenuhnya menyadari kriteria dan tujuan implementasi kebijakan. Konsekuensinya, menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Widodo 2008), "Tujuan standar harus dipahami dengan jelas dalam setiap implementasi" [13]. Oleh karena itu, orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan harus mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk memenuhi kriteria dan tujuan kebijakan tersebut. Ketika memberikan informasi kepada penegak kebijakan mengenai standar dan tujuan, komunikasi harus seragam di berbagai sumber informasi. Komunikasi adalah bagian dari implementasi dalam rangka memberikan informasi kebijakan program supaya dapat tersampaikan kepada para sasaran. Variabel komunikasi diperlukan dalam situasi ini. Koordinasi yang efektif adalah hasil komunikasi yang efektif antara individu dan organisasi. Rencana tersebut harus dinyatakan dengan jelas sebagai bagian dari proses implementasi. Untuk menjamin kesejahteraan pangan di Desa Tropodo, diperlukan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan Pokma.

Komunikasi merupakan suatu prosedur untuk pertukaran informasi yang berfungsi sebagai sumber daya untuk pemeliharaan, kemajuan, dan pengembangan organisasi yang fleksibel sesuai dengan tujuannya. Sedangkan organisasi adalah suatu kesatuan yang menjadi wadah dan wahana dalam visi untuk mencapai berbagai tujuan. Tujuan suatu organisasi didasarkan pada komponen-komponen yang berbeda-beda, dimana terdapat banyak orang, hubungan kerja, kerja profesional dan persepsi yang wajar dari para anggota sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. [15]. Dalam proses implementasi ini pemerintah sudah melakukan komunikasi secara langsung kepada para pekerja yang ada di ketahanan pangan dengan selalu menanyakan bagaimana pengembangan setiap minggunya dalam proses Program Ketahanan Pangan yang ada di Desa Tropodo.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tropodo Bersama Pokmas melalui kunjungan langsung kepala desa yang secara langsung terjun ke lapangan, untuk menanyai bagaimana pengembangan-pengembangannya bisa dibuktikan dengan hasil wawancara Bersama Kepala Desa Tropodo Bapak Haris Iswandi:

“untuk komunikasi sendiri kami masih melakukan untuk koordinasi mengenai program tersebut, banyak juga yang dibahas mengenai program yang baru kita jalankan ini” (wawancara tanggal 19 juni 2023).

Perlu juga pemerintah desa mengadakan sosialisasi atau pelatihan dalam pengembangan program ketahanan pangan agar komunikasi yang didapat atau informasi yang diperoleh memudahkan bagi masyarakat yang menjalankan program ketahanan pangan. Untuk sejauh ini kendala yang di alami merupakan kurangnya komunikasi dalam sosialisasi antar warga dalam program ketahanan pangan. Dikarenakan sebagian warga tidak mengetahui akan adanya program ketahanan pangan tersebut. Maka perlu adanya sosialisasi kepada warga agar program yang dijalankan ini bisa berjalan dengan baik.

Variabel komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan Program Ketahanan Pangan. Tempat komunikasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan Program Ketahanan Pangan Desa Tropodo. Dari segi komunikasi antar organisasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan program ketahanan pangan masih kurang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh van Meter dan Van Horn. (1974). Dikarenakan masih ada kekurangan dalam menjalankan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Maka dengan ini pemerintah perlu mengadakan forum diskusi agar komunikasi antar masyarakat dan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Karena dalam sebuah organisasi jika komunikasi antar perangkat desa dan masyarakat bisa berjalan dengan baik maka akan membantu jalannya sebuah program yang telah dijalkannya.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Variabel selanjutnya adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik. Prasyarat ini mencakup ketersediaan sumber daya finansial dan lingkungan yang dapat memfasilitasi implementasi kebijakan secara efektif, mengingat sejauh mana lingkungan kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Variabel ini juga penting untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah, dalam pandangan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 2008), menunjukkan sejauh mana kondisi lingkungan eksternal menjadi pendorong keberhasilan suatu kebijakan publik. Kondisi lingkungan yang tidak stabil atau tidak sesuai akan menyebabkan kegagalan penegakan kebijakan. [16]

Kondisi sosial pada masyarakat Desa Tropodo Kecamatan Krian yang beragam karena taraf Pendidikan yang dimiliki masyarakat cukup beragam menjadikan hal ini sebagai permasalahan. Sebagian masyarakat masih banyak yang memandang Pendidikan bukanlah hal penting oleh karena itu mengakibatkan implementasi kebijakan kurang berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk kondisi perekonomian masyarakat Desa Tropodo mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi Covid-19 juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Maka dari itu banyak warga yang menganggur. Maka pemerintah menghidupkan kembali Program Ketahanan Pangan yang dulunya sempat berhenti karena adanya pandemi covid 19, tetapi pada tahun 2022 pemerintah mulai menjalankan kembali program tersebut agar dapat membantu perekonomian Indonesia yang sempat menurun.

Senada dengan itu, hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan kondisi perekonomian masyarakat Desa Tropodo yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian yang terpuruk. Agar dengan adanya program ketahanan pangan ini dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Hal ini terlihat dari wawancara peneliti dengan kepala desa yaitu Bapak Haris Iswandi:

“Dengan program ketahanan pangan ini mbak. Sangat membantu sekali bagi masyarakat kami yang telah kehilangan pekerjaannya, agar bisa membantu berjalannya program ini, meskipun pendapatannya tidak seberapa tetapi insyaallah dapat membantu keluarga.” (wawancara tanggal 19 juni 2023)

Fenomena yang terjadi dilapangan jika dikaitkan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1974) telah sesuai dimana dengan adanya program ketahanan pangan ini dapat membantu masyarakat yang mengalami PHK. Maka dengan adanya program ini pemerintah Desa Tropodo mempekerjakan masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan supaya bisa bekerja kembali untuk membantu mengembangkan program

ketahanan pangan. Untuk itu pemerintah membuat kelompok masyarakat yang bisa juga di sebut dengan sebutan POKMAS.

IV. SIMPULAN

Dari pembahasan dan kesimpulan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan tujuan pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan dapat dikatakan berhasil jika langkah dan tujuan tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan. Oleh Van Meter dan Van Horn (1974). Dengan demikian, langkah dan tujuan pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan di desa Tropodo dinilai berhasil karena tujuan yang ditetapkan telah dikomunikasikan dengan jelas oleh masyarakat.

Sumber daya ialah faktor penting dan salah satu alat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, salah satu elemen yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya. Dengan sumber daya yang baik dan memadai maka program akan berjalan seoptimal mungkin. Untuk sumber daya manusianya di Desa Tropodo belum sepenuhnya berjalan lancar karena terkendala oleh miss komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Selain sumber daya manusia juga ada sumber daya finansial untuk sumber daya finansial anggaran yang di dapat oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat untuk saat ini sudah di kelolah dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan program ketahanan pangan. Yang terakhir adalah Sumber Daya Sarana dan Prasarana untuk sumber daya yang satu ini pemerintah desa sudah memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada di ketahanan pangan contohnya, muhola, gazebo, toilet dll.

Variable komunikasi merupakan bagian penting dalam rangka memberikan informasi kebijakan supaya dapat tersampaikan oleh semua pihak. Komunikasi memegang peran penting untuk mendapatkan informasi sebuah kebijakan. Maka dapat di katakana berhasil jika komunikasi dapat dijalankan dengan baik dan efektif. Maksud dan tujuan suatu kebijakan dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga terhindar dari distorsi atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dari perbedaan komunikasi antar organisasi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan Desa Tropodo selama pelaksanaan program ketahanan pangan ini hanyalah komunikasi dengan Pokmas saja. Maka sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa ada program ketahanan pangan maka pemerintah desa sebaiknya mengadakan sosialisasi terhadap warga.

Variabel terakhir berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Menurut Van Meter dan Van Horn (1974), variabel ini menjelaskan seberapa baik lingkungan eksternal dapat mendukung keberhasilan implementasi. Lingkungan dimana kebijakan program ketahanan pangan ini dilaksanakan adalah perekonomian berpendapatan menengah ke bawah. Lingkungan politik saat ini dalam implementasi kebijakan program ketahanan pangan mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan ketahanan pangan.

REFERENSI

- [1] akademidesa.id, “desain program/kegiatan ketahanan pangan dan hewani (contoh),” *media belajar desa*, 2022. [daring]. tersedia pada: <https://akademidesa.id/2022/03/11/gambaran-program-kegiatan-ketahanan-pangan-dan-hewani-contoh/>
- [2] n. s. wityasari, “pengertian ketahanan pangan aspek, tujuan dan faktor yang mempengaruhi,” *staf dinas ketahanan pangan kab probolinggo*, no. 1997, 2021.
- [3] m. ariani, “penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” *pus. anal. sos. ekon. dan kebijak. pertan.*, vol. 1999, no. 70, hal. 23–37, 2004, [daring]. tersedia pada: www.litbang.pertanian.go.id
- [4] doni003, “presiden tegaskan komitmen pemerintah jamin ketercukupan pangan nasional,” *kominfo.go.id*, 2022. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43658/presiden-tegaskan-komitmen-pemerintah-jamin-ketercukupan-pangan-nasional/0/berita>
- [5] a. ahdiat, “ketahanan pangan indonesia menguat pada 2022,” *katadata.com.id*, [daring]. tersedia pada: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022#:~:text=ketahanan pangan indonesia menguat lagi,2021 seperti terlihat pada grafik](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022#:~:text=ketahanan%20pangan%20indonesia%20menguat%20lagi,2021%20seperti%20terlihat%20pada%20grafik)
- [6] s. pagi, “tp pkk sidoarjo gelar sosialisasi dukung program ketahanan pangan,” *m.surabayapagi.com*, 2023. tp pkk sidoarjo gelar sosialisasi dukung program ketahanan pangan
- [7] redaksi, “dukung ketahanan pangan, ibu-ibu di sidoarjo diajak manfaatkan lahan pekarangan kosong untuk tanam sayuran,” *republikjatim.com*, [daring]. tersedia pada: <https://republikjatim.com/baca/dukung-ketahanan-pangan-ibu-ibu-di-sidoarjo-diajak-manfaatkan-lahan-pekarangan-kosong-untuk-tanam-sayuran>
- [8] s. beni, “kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di perbatasan jagoi babang kalimantan barat melalui pemberdayaan,” *inov. pembang. j. kelitbang*, vol. 9, no. 02, hal. 125, 2021, doi: 10.35450/jip.v9i02.232.
- [9] m. apriyanto, a. alfa, r. z. surya, k. n. satriawan, dan a. azhar, “implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan,” *sentri j. ris. ilm.*, vol. 2, no. 2, hal. 361–368, 2023, doi: 10.55681/sentri.v2i2.510.
- [10] y. yulianti, m. apriyanto, a. azhar, dan k. n. s. fikri, “implementasi program aksi ketahanan pangan di kabupaten indragiri hilir,” *selodang mayang j. ilm. badan perenc. pembang. drh. kabupaten indragiri hilir*, vol. 9, no. 1, hal. 16–24, 2023, doi: 10.47521/selodangmayang.v9i1.293.
- [11] r. saputra, “implementasi program pendampingan desa dalam meningkatkan ketahanan pangan,” *ulil albab j. ilm. multidisiplin*, vol. 1, no. 5, hal. 1223–1237, 2022, [daring]. tersedia pada: [http://ulilalbabinstitute.com/index.php/jim/article/view/254%0ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/jim/a](http://ulilalbabinstitute.com/index.php/jim/article/view/254%0ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/jim/article/download/254/213)
- [12] l. review *et al.*, “biograph-i : journal of biostatistics and demographic dynamic literature review : pola asuh , ketahanan pangan dan status gizi pada balita,” vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.19184/biograph-i.v3i1.
- [13] w. kurniawan dan k. d. maani, “implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan tabir selatan kabupaten merangin dengan menggunakan model donald van metter dan carl van horn,” *j. manaj. dan ilmu adm. publik*, vol. 1, no. 4, hal. 67–78, 2020, doi: 10.24036/jmiap.v1i4.95.
- [14] m. a. datus salam dan b. rosy, “pengaruh sarana prasarana dan kualitas pelayanan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil terhadap kepuasan masyarakat,” *publik j. manaj. sumber daya manusia, adm. dan pelayanan publik*, vol. 9, no. 3, hal. 377–391, 2022, doi: 10.37606/publik.v9i3.360.
- [15] a. a. nanlohy dan c. siahaan, “peran komunikasi dalam suatu organisasi the role of communication in an organization,” *jkomdis j. ilmu komun. ...*, vol. 1, no. 2, hal. 104–108, 2021, [daring]. tersedia pada: <http://jurnal.minartis.com/index.php/jkomdis/article/download/40/23>
- [16] r. p. adha, h. koeswara, dan d. aromatica, “implementasi kebijakan perpustakaan daerah implementation of regional library policy,” *j. kebijak. publik*, vol. xx, no. x, hal. 33–38, 2022.